BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan memainkan peran penting dalam pembangunan suatu negara. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyebutkan bahwa untuk menjadi negara maju, pelaku usaha harus mencakup lebih dari 14% dari total penduduk (Kompas, 2019). Namun, hingga akhir 2021, Indonesia baru mencapai sekitar 3,7% (DJPb Kemenkeu, 2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha, terutama di sektor UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan (Undang-undang (UU) No. 20, 2008), pengembangan UMKM bertujuan menciptakan struktur ekonomi yang seimbang, meningkatkan daya saing, serta memperkuat peran UMKM dalam pembangunan nasional. Pemerintah mendukung pengembangan UMKM melalui (Undang-undang (UU) Nomor 11, 2020) tentang Cipta Kerja dan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7, 2021), yang memberikan kemudahan berupa akses permodalan, pelatihan, dan teknologi.

Gambar 1.1

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM di Indonesia Berdasarkan Kelasnya (2021)

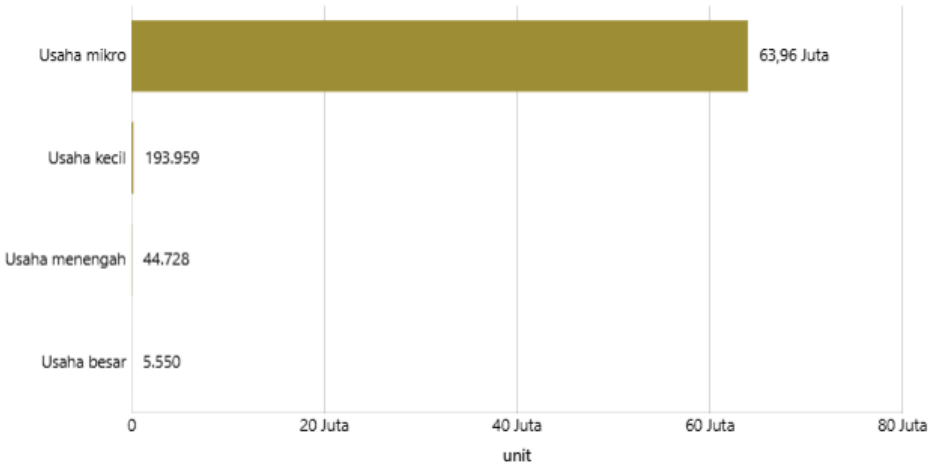

Sumber: (databoks, 2023)

Berdasarkan pada gambar 1.1, jumlah usaha mikro mendominasi sektor usaha di Indonesia pada tahun 2021 dengan total 63,96 juta unit. Di bawahnya, usaha kecil tercatat sebanyak 193.959 unit, diikuti oleh usaha menengah dengan 44.728 unit, dan usaha besar yang hanya berjumlah 5.550 unit. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Indonesia masih berada pada skala mikro, yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih besar untuk mendorong peningkatan skala usaha agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Fenomena UMKM di tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan jumlah UMKM yang telah melampaui 65 juta unit di berbagai sektor seperti kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Dukungan pemerintah semakin kuat melalui inisiatif seperti *Program UMKM Level Up* yang dirancang untuk meningkatkan kapabilitas digital pelaku usaha. Program ini mencakup pelatihan, pendampingan, dan adopsi teknologi digital untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing (Portal Informasi Indonesia, 2024). Selain itu, program ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung akselerasi bisnis UMKM. Dengan langkah ini, UMKM diharapkan dapat berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Di Kabupaten Tabalong, UMKM tersebar di berbagai kecamatan dengan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Data jumlah UMKM dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif di setiap kecamatan.

Pada tabel 1.1 sumber data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Murung Pudak memiliki jumlah UMKM terbesar, yaitu sebanyak 305 UMKM dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Hal ini mencerminkan potensi yang besar sekaligus tantangan dalam pengelolaan UMKM di kecamatan tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM sektor kuliner binaan PLUT-KUMKM dari 2021-2024 di Kabupaten Tabalong

Kecamatan	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Banua Lawas	1	0	1	0	2
Bintang Ara	1	3	1	4	9
Haruai	3	5	9	14	31
Jaro	2	3	3	3	11
Banua Lawas	1	0	1	0	2
Kelua	4	3	19	7	33
Muara Harus	1	2	2	9	14
Muara Uya	0	8	2	4	14
Murung Pudak	55	68	93	89	305
Pugaan	1	3	5	1	10
Tanjung	20	23	58	27	128
Tanta	9	11	13	12	45
Upau	9	10	9	10	38
TOTAL	**107**	**139**	**216**	**180**	-

Sumber: PLUT-KUMKM (2024)

Meskipun memberikan kontribusi besar, UMKM di Kabupaten Tabalong juga menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar pelaku UMKM di wilayah ini adalah pengusaha kecil yang mengandalkan modal dan pengetahuan terbatas dalam mengelola usahanya. Kurangnya pemahaman tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan terutama penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner. SAK EMKM dirancang untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sayangnya, implementasi standar ini masih rendah karena banyak pelaku UMKM belum memahami pentingnya laporan keuangan yang sesuai standar (Sobatpajak, 2024). Sebuah studi di Kota Tanjungbalai, misalnya, menemukan bahwa hanya 12% UMKM yang menerapkan SAK EMKM, sementara 88% lainnya tidak melakukannya.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) untuk mengatasi masalah ini. SAK EMKM adalah standar akuntansi yang dirancang khusus untuk entitas bisnis berskala mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan usaha, SAK EMKM secara khusus dibuat untuk membantu UMKM membuat dan menyajikan laporan keuangan yang lebih jelas dan mudah dipahami (Nurjannah et al., 2022) Penerapan SAK EMKM diharapkan dapat memberikan petunjuk yang tepat kepada UMKM tentang cara mencatat dan menyajikan laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan seperti investor dan lembaga keuangan (Periska & Rachpriliani, 2024)

Hambatan utama dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) mencakup kurangnya

pengetahuan tentang standar, keterbatasan kemampuan akuntansi, dan anggapan bahwa standar ini tidak relevan untuk usaha kecil. Selain itu, minimnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah turut memperparah kondisi ini (Utari et al., 2022). Pemahaman akuntansi merupakan aspek penting dalam penerapan SAK EMKM. (Winarso & Yuniarto, 2023) menjelaskan bahwa pemahaman akuntansi mencakup kemampuan memahami proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Namun, pelaku UMKM sering kali hanya menggunakan pencatatan sederhana tanpa memisahkan keuangan pribadi dan usaha, sehingga data keuangan tidak akurat untuk pengambilan keputusan.

Menurut (Peranginangin et al., 2024) laporan keuangan yang baik berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas UMKM di mata kreditur dan investor, sekaligus membantu pengelolaan usaha yang lebih profesional. (IAI-SEM EMKM, 2016) telah menyusun SAK EMKM sebagai panduan sederhana untuk pelaku UMKM. Namun, literasi keuangan yang rendah menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, asosiasi profesi, dan lembaga keuangan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya laporan keuangan. Selain itu, pendekatan kewirausahaan sosial dapat menjadi alternatif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM. Dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat, UMKM dapat memberikan dampak positif yang lebih luas.

Menurut (Nengsih & Kemala, 2023) penerapan SAK EMKM dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, persepsi pelaku, dan pemahaman akuntansi. Menurut (Rusfiandy et al., 2024) penerapan SAK EMKM dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, kebermanfaatan dan pemahaman teknologi dan informasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi yang rendah dan latar belakang pendidikan yang tidak memadai dapat menghambat penerapan SAK EMKM, yang dirancang untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan bagi UMKM (Nurjannah et al., 2022)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat ketidakkonsistenan yang menarik perhatian terkait pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM. Penelitian (Novatiani et al., 2023) menemukan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh, sementara penelitian (Pranandisya & Nugraeni, 2023) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM. Meskipun UMKM memberikan kontribusi besar, ketidaksesuaian hasil ini menciptakan celah penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, untuk memahami kondisi yang dapat memengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nengsih & Kemala, 2023), (Rusfiandy, Afifudin, & Nandiroh, 2024) & (Nurjannah, Ulum, & Oktavendi, 2022) dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM, antara lain:

1. Tingkat pendidikan
2. Persepsi pelaku
3. Pemahaman akuntansi
4. Persepsi kemudahan penggunaan
5. Persepsi kebermanfaatan
6. Persepsi pemahaman teknologi informasi

C. Batasan Masalah

Dengan banyaknya dan luasnya permasalahan yang dapat diteliti dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan agar ruang lingkupnya tidak terlalu luas dan tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Karena adanya keterbatasan waktu, dana dan tenaga penelitian ini difokuskan pada UMKM sektor kuliner di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dan hanya akan meneliti terkait Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada Pelaku UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada Pelaku UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong?
2. Seberapa besar Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada Pelaku UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada Pelaku UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
2. Untuk menguji dan menganalisis besarnya Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada Pelaku UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritik
    a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam penerapan SAK EMKM pada UMKM sektor kuliner.
    b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM.
2. Manfaat Praktis

    Membantu para pelaku UMKM sektor kuliner di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan SAK EMKM untuk mendukung kelancaran dan transparansi usaha mereka.